

SPIIL Berikan Kemudahan Transaksi e-Commerce

JAKARTA – PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIIL), perusahaan pelayaran nasional, berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam transaksi melalui platform perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

SPIIL kembali membuat terobosan melalui peluncuran mySPIIL Points sebagai bagian dari *rewarding program* yang diberikan kepada para relasi yang dengan setia dan konsisten menggunakan mySPIIL dalam melakukan semua transaksinya bersama SPIIL.

Tidak hanya menambahkan fitur mySPIIL Points dalam *rewarding program* ini, SPIIL juga menggandeng Go-Pay dalam proses penukaran poin yang diperoleh oleh relasi yang bisa menjadi saldo Go-Pay.

GM Commercial PT SPIIL Jimmy Liesensia mengatakan, pihaknya melihat perkembangan saat ini bahwa masyarakat tidak dapat lepas dari penggunaan ponsel pintar (*smartphone*) dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan dan mempermudah semua aktivitasnya.

Sementara itu, kehadiran Go-Pay dan aplikasi *online* lain saat ini begitu lekat dan menarik untuk diikuti oleh masyarakat. Karena itu, SPIIL pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Go-Pay sebagai media penukaran poin.

“Harapannya, relasi SPIIL dapat semakin memanfaatkan keuntungan dan kemudahan dalam menggunakan poin yang telah mereka peroleh. MySPIIL

Points yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi saldo Go-Pay yang dapat digunakan untuk membayar makanan, membeli *voucher* PLN, membeli pulsa, dan berbagai macam kebutuhan lain,” ujar Jimmy, dalam keterangannya, pekan lalu.

Menurut dia, proses untuk memperoleh poin bisa didapatkan klien SPIIL dari setiap tahapan yang dilakukan mulai dari membuat *booking*, membuat e-SI, e-BL, serta melakukan pembayaran melalui *virtual account*.

Keuntungan lain yang diberikan adalah admin dari pemilik akun mySPIIL akan menerima poin sebesar 50% dari setiap transaksi yang dilakukan di setiap tahapan. Karena itu, semakin tinggi tingkat penggunaannya akan semakin banyak pula poin yang dikumpulkan untuk bisa ditukarkan menjadi saldo Go-Pay.

Head of Payment Solutions Ecosystem Go-Pay Chandra Satar pun menyambut baik inisiatif kolaborasi SPIIL dengan Go-Pay tersebut. Go-Pay meyakini bahwa kolaborasi dan kemitraan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang kuat.

“Kolaborasi telah menjadi salah satu strategi utama kami dalam mendorong pertumbuhan Go-Pay sebagai alat pembayaran nontunai terdepan di Indonesia. Kami pun berharap bahwa dengan kolaborasi ini, manfaat pembayaran digital dapat dirasakan oleh lebih banyak orang,” tambahnya. (Im)



Proyek Penjaminan Satelit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) menyalami Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan (kanan) disaksikan Menkominfo Rudiantara (tengah) dan Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto serta Direktur Utama PT Satelit Nusantara Tiga Adi Rahman Adiwoso, usai penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) di Jakarta, Jumat (3/5). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memberikan Penjaminan pada Proyek Satelit Multifungsi Republik Indonesia untuk Koneksi Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia. Satelit ini akan melayani lebih dari 149.400 titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

9 Start-up Masuk Demoday Lintasarta

JAKARTA – Sebanyak sembilan usaha rintisan digital (*start-up*) terbaik telah terpilih untuk masuk dalam ajang *Demoday Lintasarta Accelerate*. Ajang ini diselenggarakan oleh Lintasarta dengan menggandeng tiga perguruan tinggi negeri, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Sembilan *start-up* terdiri atas Lokapoin (*online travel agency with local experience*), Invespropterti (platform *crowdfunding property* syariah), Edusoft (*education platform*), Mechlab (eKYC), Nusanterra (*smart monitoring energy*), SIAB (*smart water filtration*), Guarddio (*smart office security*), Sidak Debitur (*assessment for BPR debtor*), dan Codedirect (*integrate traffic system management*).

“Lintasarta bersama LPIK ITB, GIB UGM, dan BPPU ITS menelurkan sembilan *start-up* dari kategori yang berbeda. Mereka semua bagus, semua terbaik. Nantinya, produk-produk dari *Accelerate* akan dipasarkan ke pasar *business to business* (B2B),” kata Arya Damar, *president director* Lintasarta, dalam keterangannya, pekan lalu.

Dia menjelaskan, semuanya merupakan *start-up* yang terpilih setelah mengikuti masa inkubasi selama lima bulan di universitas masing-masing bersama dengan finalis lainnya. Selama masa inkubasi,

para bisnis rintisan tersebut telah mendapat *mentoring* pengembangan produk dan bisnis melalui berbagai program yang melibatkan jajaran direksi Lintasarta dan juga dari *industry expert*.

Mereka mendapatkan penilaian terbaik dari dewan juri dengan mengalahkan kandidat lainnya dan juga dinilai memenuhi kategori pemecah masalah (*problem solving*), *usefulness*, memiliki nilai komersial, dan nilai bisnis. “Para dewan juri adalah direksi, jajaran pimpinan Lintasarta, serta pimpinan inkubator bisnis dari tiga perguruan tinggi tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, *Lintasarta Accelerate* merupakan ajang pembuatan rencana bisnis dalam bentuk inovasi produk, atau aplikasi digital. Beberapa di antaranya aplikasi pada perangkat bergerak (*mobile application*), yang memiliki nilai bisnis, dan dapat diterapkan untuk mendukung berbagai sektor industri perbankan (*banking*), keuangan (*finance*), keterhubungan dengan internet (*internet of things/IoT*), dan dan kota pintar (*smart city*).

Lintasarta Accelerate telah mulai digelar sejak tahun 2016. Rencananya, kegiatan ini terus dikembangkan melalui kerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia sebagai salah satu bentuk perhatian Lintasarta dalam program pengembangan *start-up* di dalam negeri. (man)

Operator Telko Harus Konsolidasi

Oleh Emanuel Kure

▶ JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mendorong operator telekomunikasi (telko) seluler di Indonesia untuk berkonsolidasi, baik dengan cara proses akuisisi maupun merger usaha. Hal ini harus dilakukan agar industri telko di Tanah Air semakin sehat dan bertumbuh berkelanjutan.

Jumlah enam operator seluler saat ini dinilai sudah terlalu banyak, sehingga berakibat pada turunnya performa keuangan beberapa tahun terakhir karena persaingan usaha juga semakin tidak sehat. Idealnya, hanya terdapat 2-3 operator di Indonesia. Dengan demikian, performa industri akan tetap terjaga, kualitas layanan selalu baik, dan juga akan terus bertahan kedepannya (*sustainability*).

Dari tiga besar operator seluler, hanya Telkomsel yang membukukan laba bersih Rp 25,5 triliun dari pendapatan bersih senilai Rp 89,3 triliun pada 2018. PT XL Axiata Tbk mencatat kerugian bersih Rp 3,3 triliun (penyusutan dipercepat) dari pendapatan Rp 23 triliun dan PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) mencatatkan rugi bersih Rp 2,4 triliun dari pendapatan bersih tahun 2018 yang mencapai Rp 23,14

triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, sebagai regulator, pihaknya telah menyampaikan imbauan, arahan, maupun rekomendasi kepada operator seluler untuk segera berkonsolidasi. Hal ini berkaupa pada performa operator akhir-akhir ini yang ‘berdarah-darah’ mempertahankan kelangsungan bisnisnya di Indonesia.

“Pemerintah saat ini memang belum pada level memaksa. Tetapi, saya terus berusaha untuk merayu, sehingga operator bisa konsolidasi. Karena, kalau terus bertahan dengan kondisi ini, saya sangat yakin operator tidak akan bertahan, layanannya juga kualitas akan terus menurun. Jadi, saya melihat, kalau kondisi terus seperti ini, bukan tidak mungkin, kita akan mewajibkan operator untuk konsolidasi,” kata Rudi-

antara di acara *Talkshow* dan Seminar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, untuk berkonsolidasi, panduan dan regulasinya sebenarnya telah tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun dalam peraturan pemerintah (PP) turunannya. Selain itu, fakta telah membuktikan bahwa konsolidasi mulai terjadi walaupun tanpa regulasi yang detail seperti peraturan menteri (permen). Satu di antaranya terjadi pada merger operator XL dan Axis yang sekarang telah menjadi XL-Axiata.

“Regulasi sebenarnya sudah ada, baik itu di UU maupun PP, sehingga tanpa peraturan yang lebih detail seperti permen pun bisa terjadi konsolidasi. Sekarang, tinggal *mindset* dari operator untuk melakukan itu (konsolidasi),” ujarnya.

Rudiantara mengakui, terdapat kendala yang membuat konsolidasi antaroperator lambat terjadi. Di satu sisi, persoalan tersebut terkait dengan regulasi. Tetapi, di sisi lain, ada keengganan dari para *stakeholder*, termasuk operator untuk berkonsolidasi.

Dari sisi regulasi, disebutkan dalam UU Telekomunikasi bahwa frekuensi adalah milik negara dan merupakan sumber daya yang terbatas. Karena itu, pemanfaatannya harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Akibatnya, apabila satu operator diakuisisi oleh operator lain, operator

yang diakuisi harus menyerahkan kembali frekuensi yang menjadi hak operasinya kepada negara. Hal ini akan berdampak kepada operator yang mengakuisisi operator lain bakal hanya membeli perusahaan yang kosong tanpa kepemilikan frekuensi lagi.

“Karena itu, saat ini, kami sedang menyusun aturan merger dan akuisisi di sektor telekomunikasi yang lebih detail, bisa saja dalam bentuk permen nanti. Tetapi, saya ingatkan kepada operator supaya jangan takut kehabisan frekuensi. Frekuensi akan selalu ada, dan kita sedang menyusun untuk mempersiapkan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan,” tegas dia.

Sementara itu, kendala lain, enggan *stakeholder* perusahaan untuk melakukan konsolidasi. Menurut Rudiantara, *mindset* para pemegang saham harus diubah. Karena, kalau kondisi perusahaan terus merugi bakal tutup dengan sendirinya.

“*Mindset* para *stakeholder* harus diubah. Kita ingin supaya industri tetap tumbuh, sehat, dan *sustainable*. Oleh karena itu, konsolidasi adalah langkah yang tepat,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo yang juga Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ismail mengatakan, untuk memuluskan proses konsolidasi, pemerintah menawarkan tiga opsi kepada operator terkait kepemilikan frekuensi.

Treasury, Platform untuk Beli dan Simpan Emas

JAKARTA – Treasury, platform daring untuk beli, simpan, serta jual emas batangan dan perhiasan, mulai beroperasi sejak November 2018. Lebih dari itu, platform juga menyediakan layanan transfer dan *redeem* emas untuk semakin memudahkan pengguna Aplikasinya dapat diakses melalui Google Playstore dan Apps Store.

Terkini, promo Teman Treasury pun diluncurkan untuk mendukung masyarakat agar punya penghasilan tambahan dan ajakan untuk *#PunyaSimpanan Emas Lebih*. Dalam mengelola keuangan pribadi, hal yang harus didahulukan adalah alokasi untuk memiliki simpanan, termasuk emas.

Business Analyst Executive Treasury Fahlevi Dzulfikar menjelaskan, untuk menjadi Teman Treasury, pengguna hanya perlu mendaftarkan diri dengan membeli emas senilai Rp 50.000, belum termasuk pajak pada saat proses awal pendaftaran. “Setelah itu, Teman Treasury akan diminta membuat kode referral untuk dibagikan dan mengajak teman untuk menjadi pengguna Treasury,” ujar Fahlevi, dalam keterangannya, pekan lalu.

Menurut dia, Teman Treasury akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, Teman Treasury akan mendapatkan emas gratis yang jumlahnya bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Kedua, mendapatkan poin dari setiap transaksi yang dilakukan mulai dari Rp 20.000 yang berlaku kelipatannya dan kesempatan mendapatkan emas gratis setengah kilogram. Ketiga, bisa

mengakses promo khusus dan juga berbagai pelatihan.

Founder and Financial Planner Finansialku Melvin Mumpuni menuturkan, arus kas personal adalah salah satu fondasi dasar dari perencanaan keuangan. Tujuan keuangan akan lebih memungkinkan untuk dicapai apabila kesehatan arus kas terjaga dengan baik.

“Namun sayangnya, banyak orang yang terbalik dalam menyusun skala prioritas arus kas keuangan dengan berusaha memperbaiki keuangan dengan menekan pengeluaran. Padahal, untuk mencapai arus kas yang sehat, bisa dilakukan dengan mencari penghasilan tambahan,” sarannya.

Kriteria arus kas keuangan personal yang sehat adalah penghasilan yang didapatkan bisa mencukupi semua jenis pengeluaran bulanan. Caranya dengan mendahulukan pengeluaran untuk tabungan agar bisa *#PunyaSimpanan Emas Lebih*, sehingga rencana keuangan jangka panjang bisa tercapai. Dia pun menyampaikan tips dalam menyusun skala prioritas arus kas keuangan yang ideal. Pertama, dahulukan untuk membayar pajak dan zakat. Kedua, alokasikan untuk tabungan dan investasi. “Ketiga, adalah dengan melunasi hutang dan juga alokasi untuk pengeluaran rutin rumah tangga,” ujar Melvin, berbagai tips ideal dalam mewujudkan arus kas personal yang sehat.

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2018, masyarakat Indonesia perlu meningkatkan penghasilannya lebih dari 300% untuk mencapai taraf

hidup yang tinggi, atau senilai dengan US\$ 12.400. Saat ini, Indonesia masih tergolong negara berpendapatan menengah ke bawah dengan pendapatan per kapita US\$ 4.041.

Menutup diskusi dengan teman media, Fahlevi menyimpulkan dan berharap bahwa promo Teman Treasury bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Sebagai platform daring untuk beli, simpan, serta jual emas batangan dan perhiasan, Treasury menyediakan berbagai pilihan pembayaran Isi Ulang Celengan melalui akun virtual (*virtual account*) antara lain BCA, BNI, Mandiri, dan BRI. Isi ulang juga dapat dilakukan dengan bank transfer melalui ATM Bersama, *convenient store* melalui Alfamart, dan *e-Wallet* melalui Doku Wallet.

Treasury telah menjadi anggota Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), asosiasi yang memayungi perusahaan dan institusi keuangan yang memaksimalkan peran teknologi dalam bisnisnya. Keanggotaan Aftech merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan teknologi finansial (*fintech*) dalam melakukan proses pencatatan untuk mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk menjaga keamanan pelanggan, Treasury juga telah bekerja sama dengan lembaga kliring sebagai penjamin transaksi dan Untung Bersama Sejahtera (UBS) sebagai penyedia emas yang ditransaksikan. (Im)



PT Satria Mega Kencana Tbk.
 (“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) (RUPST dan RUPS LB bersama-sama disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/28 Mei 2019
Pukul : 14.00 WIB selesai
Tempat : Sotis Residence Penjernihan
Jl. Penjernihan I No 10B, RT 007/RW 006,
Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta Pusat

RUPST

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tarifiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan atas penggunaan dana hasil pelaksanaan waran Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan waran Perseroan.

RUPS LB

Dengan mata acara RUPS LB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).
2. Persetujuan pemberian *corporate guarantee* atas rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh PT Dwimukti Mitra Wisata selaku entitas anak Perseroan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Ketentuan Umum:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTP yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTP, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pengumuman suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor pusat Perseroan di Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Kecamatan Pulo, Kabupaten Baru, Jakarta Selatan.
5. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui website Perseroan, yaitu <https://satriamegakencana.com/> atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://satriamegakencana.com/>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Mei 2019
Direksi Perseroan